

BAB IV

PANDANGAN ANGKATAN UMAT ISLAM (AUI) BUKAN BAGIAN DARI DI/TII JAWA BARAT

A. Arah Perjuangan Angkatan Umat Islam (AUI)

Kiai Mahfud dipandang sebagai *rama* (bapak) yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan material, spiritual, serta pelepasan kebutuhan emosional para santri. Kiai Mahfud mempunyai status dan peranan yang mantap meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat sehingga nama Kiai Mahfud dipandang sebagai *rama pusat*. Dalam hubungan patron-client¹ ini, para santri menjadi tulang punggung yang setia, membantu terselenggaranya upacara-upacara keagamaan, bahkan bersedia mempertaruhkan jiwa dan raga demi mempertahankan kepentingan bapak. Kiai Mahfud harus selalu dihormati, ditaati, dan pantang untuk ditentang. Konsep ini merupakan suatu hubungan timbal balik untuk saling memberi dan menerima secara informal antara dua pihak yang masing-masing mempunyai status tidak sama tinggi derajatnya. Sistem sosial bapakisme ini berlaku begitu kuat.

Anggota AUI adalah petani-petani desa, berpendidikan formal rendah, tingkat pengetahuan umum kurang, tingkat pendapatan relatif kurang, namun memiliki sikap dan pendirian yang fanatik terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan para kiai AUI.

¹ Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Lihat Nasruddin Anshori, *Neo Patrotisme: Etika Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 2008, hlm. 21.

Hal ini berbeda dengan organisasi-organisasi perjuangan lain yang rata-rata beranggotakan para pegawai, buruh, dan pedagang. Keanggotaan AUI bersifat sukarela dan tidak memerlukan persyaratan khusus, serta bersifat terbuka. Asalkan yang bersangkutan beragama Islam dapat diterima dan dibaiat sebagai anggota. Untuk menjadi anggota, penerima dapat melalui ranting, cabang maupun pusat.

Kiai-kiai ranting AUI datang ke Somalangu setiap hari Selasa. Kedatangan mereka sering disertai sekitar lima orang anggota baru untuk masuk asrama (sebagai santri baru). Hubungan antara AUI pusat dan kiai-kiai desa di tingkat ranting sudah lama terjalin, sebelum secara organisatoris mereka terikat. Anggota AUI secara keseluruhan tidak ada data yang pasti karena sistem keanggotaannya tidak mengenal *member* dan *non member*. Keanggotaannya bisa terjadi di belakang anggota potensial, masih ada lagi anggota yang tidak tercatat, misalnya sebuah kelompok sosial.²

Sistem keanggotaan AUI yang tidak membedakan geografis dan sosial, serta tidak dilakukannya pencatatan keanggotaan, cukup sulit untuk mengetahui jumlah anggota AUI secara pasti. Namun, persamaan kepentingan, budaya, dan konsep, menjadikan mereka adalah satu kelompok dengan tingkah laku yang sama dan mempunyai *we feeling*³.

² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991, hlm. 118.

³ *We feeling* atau *sense of we ness* adalah rasa kekitaan dimana rasa identifikasi dan keadaan psikologis yang memungkinkan orang untuk merasakan kesatuan perasaan dan tujuan menuju tujuan bersama. Lihat Abdul Irsan, *Indonesia Di Tengah Pusaran Globalisasi*, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2007, hlm. 113.

Peranan kiai selain pada pelayanan keagamaan, juga menyelesaikan masalah di bidang hukum serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah spiritual. Para kiai amat tanggap terhadap haeapan-harapan tersebut dengan bertindak sebagai pembela kepentingan masyarakat dan pewaris ortodoksi Islam. Kepemimpinan Kiai Mahfud adalah kepemimpinan kharismatik. Kemampuan kiai sebagai tokoh kharismatik menciptakan kesan keramat pada dirinya dan sifat-sifat yang disandangkan kepada mereka oleh para pengikutnya sebagai hasil dari sifat-sifat yang mereka perlihatkan.

Sebuah otoritas kharismatik tidak dapat menjadi otoritas legal dan rasional. Karena otoritas kharismatik cenderung menjadi permanen, maka wibawanya yang menjadi tumpuan AUI juga cenderung tidak dapat dilepaskan. Para pengikut Kiai Mahfud berpangkal pada rasa kewajiban moral. Mereka akan menuruti segala perintahnya sekalipun tindakan-tindakan yang dikehendaki mungkin tampak bertentangan, setidaknya-tidaknya bagi pengamat luar dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, keyakinan agama, atau nilai-nilai ideologi para pengikut.⁴

Angkatan Umat Islam didirikan untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia, namun tidak ingin melakukan politik praktis. Penekanannya adalah menitikberatkan perjuangan budaya karena di luar struktur yang perlu diperjuangkan umat Islam. Untuk cepat menegakkan hukum Islam di Indonesia maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengusir orang-orang Belanda dari Indonesia. Karena itu AUI

⁴ Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm. 3.

perlu mempersenjatai diri dan melakukan pendekatan dengan Allah lewat serangkaian doa dan upacara keagamaan. AUI lahir sebagai wahana koordinasi ulama dan masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kehadiran para ulama itulah yang menjadikan AUI amat diterima masyarakat desa.

Hukum agama selalu menjadi pertimbangan pemuka-pemuka AUI bagian rohani mempunyai peranan besar dalam kepengurusan AUI. Tokoh-tokoh di bagian itu ialah Kiai Zamach Syari, Kiai Taifur, Kiai Ahmad Ridho, Kiai Luqman, juga Kiai Mahfud sendiri. Pelajaran-pelajaran rohani yang diberikan meliputi tauhid, fiqih, dan juga tarikh Nabi.⁵ Para prajurit diasramakan, mendapat latihan militer, bimbingan pelajaran rohani, dan pada waktu senggang juga wirid atau sembahyang malam. Mereka tampak bersedia untuk menyucikan diri sebelum mati syahid.

Prajurit AUI perlu menghafal doa, menyimpan rajah atau haekal. Sebelum melepaskan senjata, setiap prajurit AUI wajib mengucapkan doa agar mengenai sasaran. Demikian pula sebelum menggunakan senjata-senjata tajam. Senjata-senjata tajam yang digunakan antara lain adalah blandring (semacam tali pelempar), baser (panah dengan racun katak dan kapur), juga senapan-senapan. Prajurit AUI wajib berseru *Allahu Akbar* ketika menyerang.⁶ Disamping itu, doa bagi mereka merupakan senjata juga. Basis moral agama itu dapat dipandang sebagai formula politik bagi AUI yang memungkinkannya menarik pengikut.

⁵ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 116.

⁶ Wawancara KH. Slamet tanggal 4 Juni 2014.

Di lingkungan AUI dikenal semboyan “Mati Surga, Menang Jaya”, membuat orang-orang pedesaan menyambutnya sebagai panggilan perang jihad. Kiai Mahfud memiliki banyak kitab, kurang lebih sebanyak dua kamar, suatu hal yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang terpelajar. Ia selalu menggubahkan kitab Al Quran sebagai referensi pokok. Dalam hal ini, tafsir Al Quran digunakan atau difungsikan untuk melakukan perubahan. Akan tetapi, tataran penggunaan ayat-ayat Al Quran dan Hadis sebagai referensi dalam mengantisipasi perubahan, masih dalam tataran Islam sebagai suatu ide dan belum sebagai ilmu.⁷ Dalam tahap ini, para kiai AUI melihat Al Quran sebagai dogma sentral yang keberadaannya mutlak, absolute, dan integral. Di dalam lingkup AUI, banyak pantangan yang didasarkan pada aturan yang ada dalam Al Quran.

Para pemimpin AUI senantiasa menjaga akhlak dan moralitas, baik selaku individu maupun kelompok. Ajaran akhlak senantiasa bersifat praktis, dalam arti dapat langsung dipraktekkan dalam lingkungan moral yang sepenuhnya berorientasi pada aspek-aspek normatif yang baku. Terlihat bahwa para pemimpin AUI tidak berkehendak melakukan perubahan internal dalam usaha mengantisipasi kehidupan eksternal. Mereka kurang mampu menangkap perubahan yang terjadi pada *outer group* yang lebih mendasar pada konsepsi legal, rasional, dan prospektif. Padahal para kiai AUI dalam mengajarkan tauhid, fiqih, dan tarikh Nabi Muhammad selalu merujuk Al Quran dan Hadis sebagai pembenaran.

⁷ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 15.

Bagi masyarakat pedesaan, para kiai AUI memegang peran untuk membentengi umat dan cita-cita umat Islam dari ancaman kekuatan sekuler dari luar. Para kiai AUI mampu menjelaskan masalah teologi yang sulit kepada para petani muslim sesuai dengan pandangan atau suara hati nurani mereka. Di mata para pengikutnya, kiai dipandang sebagai lambing *kewahyuan*, memiliki keahlian di bidang agama, memiliki integritas moral, serta memiliki kemampuan mengajar dan berkhotbah.

Peran para pemimpin AUI dalam menggerakkan masyarakat bertempur melawan Belanda amat besar. Dalam rapat-rapat Kiai Mahfud akan menulis ayat-ayat di papan, kemudian bermusyawarah tentang arti dan pelaksanaan ayat-ayat itu. Ketika pada bulan November 1945, AUI berangkat untuk front Sidoarjo di Surabaya, sebelum pasukan dikirim, perbekalan dan badan makanan dikirim lebih dulu. Tindakan ini didasarkan pada sebuah ayat yang mendahulukan kata *amwalikum* (harta benda) daripada *anfusakum* (dirimu) dalam ayat tentang jihad.⁸ Penarikan uang atau makanan dari penduduk didasarkan atas ketentuan mengenai sedekah, zakat, atau zakat fitrah. Mereka mengusahakan agar jangan sampai prajurit yang menghadapi maut karena peperangan akan memakan barang haram.⁹ Tindakan berjaga-jaga ini merupakan sikap yang dinilai paling tepat karena iklim struktural dan kultural yang belum dijiwai nilai Islam,

⁸ Lihat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 20.

⁹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 116.

Sikap hati-hati tentang barang haram ditunjukkan para pemimpin AUI yang tidak suka berdagang, mengadu untung di pasar, dan mendasarkan perolehan pendapatan dari sawah dan tegalan. Kiai Mahfud mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dari dua hektar sawah yang dimilikinya dan selalu memantangkan barang haram untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Inilah yang dicontohkan kepada para pengikutnya. Pada tataran ini dapat dilihat bahwa pemahaman Islam di lingkungan AUI masih Islam sebagai ide dan belum Islam sebagai ilmu.

Para kiai AUI terlihat sebagai *broker*¹⁰ kultural internal daripada sebagai pembawa perubahan sosial. Karena itulah mereka gagal menerjemahkan institusi nasional ke dalam komunitas lokal atau menerjemahkan unsure kosmopolitan Islam ke dalam lingkungan lokal penduduk pedesaan. Para kiai AUI berperan sebagai alat penyaring atas arus informasi ke lingkungan santri. Mereka menularkan apa yang dianggap merusak bagi mereka dan membuang apa yang dianggap merusak bagi mereka. Hal itu cukup relevan untuk memahami perilaku kiai di lingkungan komunal AUI. Mereka lebih mempertahankan pola kebudayaan lama walaupun tetap didasarkan pada kaidah hukum agama. Kaidah hukum agama ini digunakan sebagai pemeliharaan dari budaya lama daripada terjadi keterpengaruhan dengan budaya baru yang tidak tentu lebih baik.¹¹

¹⁰ Broker adalah perantara atau pihak yang menjembatani suatu transaksi. Wawancara H.R. Sunarto Danusumarto tanggal 25 Maret 2014.

¹¹ Wawancara KH. Amallul Umam tanggal 5 Juni 2014.

Pemahaman Islam yang mencapai tataran Islam sebagai ide, menjadikan AUI menempatkan komunalisme lebih tinggi dan menempatkan *outer group* sebagai kelompok yang membahayakan eksistensi internal. Karena itu, kelompok-kelompok yang berada sebagai rival perlu memberikan hak hidup kepada AUI dengan segala aspek struktural kehidupannya.

Untuk kalangan internal, AUI menetapkan sejumlah perangkat ibadah sebagai pendukung komunalismenya. Setiap malam para santri diwajibkan sholat malam, wirid, dan upacara doa yang dipimpin Kiai Mahfud atau mereka yang ditunjuk. Demikian pula pada setiap akan melakukan latihan militer, pengajian, tadarus, dan lainnya selalu dilakukan upacara doa. Bagi para kiai AUI, doa hanyalah permohonan, tetapi di kalangan pengikutnya terdapat *parochialisasi*.¹² Doa lalu dianggap sebagai mantra dengan efek magis.

Kegiatan-kegiatan AUI sebagai kegiatan kolektif didasarkan pada latar belakang budaya yang sama. Anggota AUI mempunyai *we feeling* lebih dibandingkan kelompok-kelompok perjuangan lainnya. Hal demikian sering merepotkan koordinasi, terutama dari pemimpin militer formal, seperti yang ditunjukkan ketika Mayor Soedharmo melakukan koordinasi pada Februari 1949.¹³

¹² Parokialisme adalah sebuah pandangan pribadi terhadap dunia hanya didasarkan pada perspektif dan nilai-nilai sendiri. Pandangan ini tidak mengakui atau menghormati perspektif atau cara hidup lain. Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2008, hlm. 182.

¹³ Panitia Peringatan 17 Agustus 1953, *1 Windu Kebumen Berdjuang*, Kebumen: Bagian Penerangan Kabupaten Kebumen, 1953, hlm. 13.

Ada pembagian tugas kepemimpinan pada kelompok-kelompok pengurus sekalipun komando tertinggi tetap di tangan Kiai Mahfud. Kelompok ketua mempunyai tugas memberi komando secara umum dan bimbingan secara hukum Islam. Dalam kelompok ini, terdapat ahli-ahli agama yang disebut kelompok rohani.

Kelompok rohani memberikan pelajaran tauhid, fiqih, dan tarikh Nabi Muhammad SAW kepada para prajurit yang telah diasramakan. Kelompok rohani juga bertugas membuat rajah, serta memimpin doa-doa sebelum prajurit maju kemedan perang. Dalam kelompok ini duduk tokoh-tokoh Islam di Kebumen, yaitu Kiai Zamach Syari, Kiai Taifur, Kiai Ahmad Ridho, Kiai Luqman, serta Kiai Mahfud. Bagian rohani mempunyai peranan besar, mereka membimbing para prajurit bagaimana cara menyucikan diri sebelum mati syahid dalam perang jihad membela Islam.¹⁴

Kelompok penulis dipimpin Haji Nursidik yang bertugas mengurus administrasi, juga kelaskaran dan kepemudaan. Tugas kelompok ini mencakup mendidik para prajurit santri dalam hal taktik dan strategi militer, serta *olah kanuragan*.¹⁵ Kelompok ekonomi atau bendahara bertugas mengumpulkan dana yang

¹⁴ Danar Widiarta, “Angkatan Oemat Islam 1949-50, Studi tentang Gerakan Sosial di Kebumen”. *Jurnal Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2004, hlm. 36.

¹⁵ Olah kanuragan adalah seni belajar seni bela diri terutama untuk mempertahankan diri bila diserang, juga untuk berlaga, dan menyerang lawan. Dalam kanuragan yang dilatih, ditatar adalah raga, sehingga orang yang mempelajari dan mempraktekkan kanuragan menjadi kuat dan bahkan dibilang sakti karena dia menjadi antara lain kuat menerima pukulan, tidak mempan senjata tajam, tembakan peluru dan sebagainya. Wawancara KH. Slamet tanggal 4 Juni 2014.

disetor dari pengurus ranting atau cabang, serta dana sukarela dari masyarakat luas.¹⁶ Besarnya perhatian dan sumbangan masyarakat umum menjadikan AUI cepat tumbuh dan menjadi organisasi yang berkekuatan besar. Barang-barang yang disumbangkan antara lain beras, uang, padi, ayam, ketela, dan bahan-bahan lainnya. Keadaan ini berlangsung sebelum maupun selama pemberontakan berlangsung.¹⁷ Di lingkungan AUI, hukum Islam menjadi pertimbangan utama para pemimpinnya dalam menyelesaikan suatu masalah, baik internal maupun eksternal. Dalam rapat-rapat Kiai Mahfud akan menulis ayat-ayat di papan tulis, kemudian bermusyawarah tentang arti dan pelaksanaan ayat-ayat tersebut.

B. Hubungan Sosiokultural Kekuasaan Elit di Kebumen

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Pemerintah Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri),

¹⁶ Wawancara KH. Afifuddin Chanif Al Hasani tanggal 22 Juni 2014.

¹⁷ Arsip Kepolisian Negara RI (1947-1949) Bundel No. 763 : Bahan Makanan Tahun 1948

¹⁸ UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 point 12.

juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dekosentrasi dari pemerintah di atasnya.

Warga desa amat menghargai posisi orang-orang yang dituakan, walaupun pada umumnya mereka yang dituakan umurnya relatif sudah tua. Mereka disegani oleh warga desa dan pemimpin desa karena asal keturunannya, karena tingkah lakunya, yang menurut kebudayaan Jawa dianggap baik, dan juga karena kekayaannya.¹⁹ Orang-orang tua yang dihormati ini mempunyai fungsi sebagai penasihat dan pengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa, baik yang dilakukan oleh pemimpin desa (lurah) maupun yang dilakukan oleh warga desa. Peranan para orang tua ini sebenarnya merupakan suatu ekspresi dari struktur sosial Jawa yang menekankan perbedaan umur dan generasi. Dengan implikasi-implikasinya yang antara lain menyangkut pendapat bahwa orang-orang yang lebih tua lebih banyak mengetahui berbagai hal daripada orang-orang yang lebih muda.

Keadaan sosial di desa Somalangu, pusat gerakan AUI, struktur sosial mengalami dualisme antara masyarakat yang loyal kepada pemimpin informal dan masyarakat yang loyal kepada pemimpin formal. Para pemimpin informal adalah para pemimpin agama (Islam) yang justru lebih disegani warga desa. Adanya dualisme kepemimpinan ini sering merepotkan terlaksananya program-program desa yang melibatkan semua warga. Dualisme terjadi karena para pemimpin informal dalam banyak hal tidak menyetujui tindakan para pemimpin formal. Budaya para pemimpin

¹⁹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.112

formal adalah budaya abangan, dan hal ini dinilai para pemimpin informal tidak pas dengan budaya kaum santri. Dalam skala yang lebih besar, ketidaksediaan warga AUI mengirimkan beras bantuan ke India lewat Pemda Kebumen pada tahun 1946, menunjukkan ketidakcocokan AUI dengan para birokrat. Beras itu dikirim langsung ke Jakarta untuk diteruskan ke India.

Pemerintah Hindia Belanda dalam *Desa Ordonantie*²⁰ yang disahkan pada 2 Agustus 1941. ingin memberikan kesempatan lebih besar kepada desa untuk mengurus diri.²¹ Akan tetapi, keputusan itu belum sempat dilaksanakan. Pemerintah Jepang yang menggantikan Belanda menguasai Indonesia, menggunakan kedudukan hukum desa untuk pengerahan tenaga dalam pembangunan perang. Meskipun susunan pemerintah tingkat pusat berganti-ganti, pemerintahan desa tidak pernah berubah. Status hukum desa tak banyak mempengaruhi penduduk. Pemerintahan desa tetap dipegang oleh pamong desa yaitu lurah dan perabot desa. Merekalah yang dinamakan para pemimpin formal. Para pamong desa ini sering berjumlah 15 orang,

²⁰ Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Januari 1941 menyampaikan rancangan Rancangan Desa ordonannantie baru kepada Volksraad. Ordonnantie itu kemudian ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005, hlm. 136.

²¹ Substansi Desa ordonannantie baru berlainan dengan ordonannantie-ordonannantie sebelumnya. Prinsipnya ialah supaya Desa diberi keleluasaan untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri. Untuk mencapainya, Desa tidak lagi dikekang dengan berbagai peraturan-peraturan (regulasi) yang mengikat dan instruktif. *Ibid.*

dan semuanya mendapatkan gaji yang dinamakan *bengkok*. Besar kecilnya jumlah bengkok tergantung pada luas tanah milik desa.²²

Lurah mendapatkan bengkok terbesar dan dalam hirarki terletak di puncak. Sebagian besar lurah termasuk deretan orang kaya di desa. Kekayaan atau luas sawah itulah status simbolnya. Semakin besar bengkoknya, semakin besar warga yang dijadikan *andahan* (pembantu) guna mengolah sawah. Pamong desa bertugas melaksanakan keputusan dari instansi yang lebih tinggi mengenai desanya, dan sebaliknya mengurus kepentingan penduduk yang berhubungan dengan instansi di atasnya. Hal penting yang menyangkut penduduk akan dibicarakan dalam rapat desa. Sebagai bagian dari birokrasi seluruh negara, pamong desa mewakili pemerintah di muka masyarakat. Kedudukan pamong desa di mata penduduk adalah sebagai pemerintah.²³

Selain mendapatkan tanah bengkok²⁴ dari desa, lurah masih menerima sumbangan-sumbangan berupa beras tiap kali panen padi dan palawija pada waktu panen palawija dari warga desa. Lurah juga masih mendapat tambahan penghasilan lainnya berupa pemberian-pemberian yang bersifat khusus dari para pendatang baru

²² Soetardjo Kartohardikoesoemo, *Desa*, Bandung: Sumur, 1965, hlm. 35.

²³ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.110.

²⁴ Bengkok adalah pemberian hak pakai kepada para pejabat pemerintah desa atau pamong sebagai gaji selama mereka menjabat. Mereka hanya mendapatkan hak pakai sekitar 20% dari luas tanah bengkok sampai yang bersangkutan pensiun. Sadikin, *Konflik Keseharian di Pedesaan Jawa*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2007, hlm. 31.

yang akan menyewa tanah warga desa. Selain itu, lurah masih mendapat bagian dari pajak yang dikumpulkan dari desanya. Di samping keuntungan-keuntungan material dan uang yang diterima, lurah masih dihormati warga desa. Penghormatan-penghormatan itu berbentuk dalam berbagai tindakan sesuai dengan *etiket* atau tata cara menurut kebudayaan Jawa untuk menghormati yang lebih berkuasa.

Sebenarnya birokrasi tingkat desa pada masa Jawa kuno sudah cukup tinggi. Dahulu, Kebumen termasuk ke dalam wilayah Bagelen sebagai suatu daerah *vorstenlanden*²⁵, yang sesudah Perang Jawa pada 1830 menjadi daerah gubernemen. Di bawah pemerintah Hindia Belanda, segala peraturan pemerintah yang menyangkut desa seperti *cultuur-stelsel*, pajak-pajak, atau *heerendiensten*, terasa sampai ke desa. Dalam tanam paksa, kaum tani tidak mempunyai hak menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam dan mereka diwajibkan membayar pajak tinggi. Tidak ada keadilan yang merata antara petani dan tuan tanah. Tanam paksa adalah peraturan dari pemerintah Belanda yang mengharuskan rakyat dan petani menyerahkan hasil tanaman sebanyak 2/3 dan 1/3 hasil untuk petani.

Para pamong desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas tersebut. Demikian pula pada masa pendudukan Jepang, pengerahan tenaga kerja untuk *gugur gunung* atau romusha terjadi. Itu semua membuat lurah dan pamong desa atau pemerintah desa dirasakan sebagai lembaga kekuasaan oleh penduduk desa. Pendek

²⁵ Vorstenlanden atau daerah swapraja (wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan penguasa pribumi) yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri, Tania Murray Li, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002, hlm. 92.

kata pamong desa merupakan perpanjangan penguasa di tingkat yang lebih atas. Pemerintah desa cenderung muncul dan berkembang menjadi kekuasaan legal. Sebagai akibatnya, *honor* pada lurah berubah menjadi *power* sehingga menyebabkan penghormatan kepada lurah menjadi merosot. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa tradisi lama yang menganggap lurah sebagai *patriarch* desa sedang meluntur dan sedang digantikan oleh tradisi baru, yaitu lurah hanyalah seorang pejabat dari sebuah birokrasi yang bersifat rasional dan impersonal. Inilah yang menyebabkan loyalitas penduduk berubah dari ikatan nonkontraktual ke ikatan kontraktual yang dikuatkan dengan sanksi hukum. Singkatnya status lurah telah digantikan oleh *power* akibat solidaritas sosial lama yang mulai retak.²⁶

Dengan menggunakan konsep involusi pertanian²⁷, dapat diuraikan kemungkinan-kemungkinan untuk memahami pertumbuhan masyarakat pedesaan yang sangat lambat. Baik yang dipengaruhi maupun yang tidak dipengaruhi oleh dunia luar. Involusi pertanian merupakan hasil penelitian sistematis terperinci tentang bagaimana dan mengapa pengolahan tanah dan struktur desa berkembang menjadi pola-pola kebudayaan. Seolah-olah telah mencapai bentuknya yang pasti tetapi gagal

²⁶ Kuntowijoyo, *loc.cit.*

²⁷ Menurut Geertz involusi ialah perubahan yang hampir tidak terjadi perkembangan karena terbagi, maksudnya kenaikan jumlah produksi bersamaan dengan melonjaknya jumlah penduduk (Produksi mengikuti deret ukur, jumlah penduduk mengikuti deret hitung). Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1983, hlm. 297.

dalam menstabilisasikan atau mengubah dirinya menjadi pola-pola baru. Bahkan selanjutnya berkembang dengan susunan yang semakin rumit.

Pembagian kelompok sosial dengan ukuran kekayaan atau pengelompokan berdasar kelas, tidak cukup efektif di Jawa. Faktor ekonomi yang berkenaan dengan pendapatan dan pemilikan tanah memang belum begitu penting. Pengelompokan sosial yang paling efektif adalah yang berdasarkan kebudayaan atau agama. Dapat dikatakan bahwa seluruh desa di Kebumen adalah penganut Islam. Justru partisipasi dalam agamalah yang membagi masyarakat ke dalam kelompok abangan dan santri.

Kebudayaan yang menonjol di daerah Kebumen adalah kebudayaan santri. Dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk desa di Kebumen merupakan penganut Islam. Pada tahun 1951, dari jumlah pesantren yang berjumlah 623 buah, terdapat 623 guru dengan jumlah murid 18.455 orang. Di Kebumen terdapat 803 masjid, 2.270 langgar dan 94 mushala, serta lebih dari 96% penduduknya beragama Islam pada tahun 1989.²⁸

Intensitas penghayatan dan pengamalan syariat Islam tidak merata di segenap lapisan masyarakat dan daerah. Dalam masyarakat Jawa terdapat tiga varian tentang konsep agama Jawa yaitu priyayi, santri dan abangan. Dilihat dari tingkat pemahaman, penghayatan dan pengamalan praktik agama Islam, hanya ada dua kelompok masyarakat Jawa yaitu santri dan abangan, sedangkan priyayi lebih menunjuk pada status sosial seseorang, yang menurut hukum merupakan elite

²⁸ Danar Widiarta, "Angkatan Oemat Islam 1949-50, Studi tentang Gerakan Sosial di Kebumen". *Jurnal Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2004, hlm. 34.

tradisional. Abangan sebagai gejala kultural merupakan perwaris terhadap nilai-nilai tradisional yang ada di dalam masyarakat. Abangan adalah istilah untuk menyebut golongan orang Islam yang menerima Islam hanya sebagai keyakinan namun jarang melaksanakan ibadah menurut agama Islam dan lebih berpegang pada tradisi yang ada. Istilah-istilah tersebut menunjukkan dimensi-dimensi variasi kebudayaan.²⁹ Priyayi, sebagai suatu komunitas sosial, termasuk dalam klasifikasi abangan.

Unsur budaya dominan dalam desa sangat tergantung dari posisi mayoritasnya. Ada 22 kecamatan di Kebumen, terdapat lima kecamatan yang mayoritas penduduknya termasuk golongan abangan, yaitu kecamatan-kecamatan Karanggayam, Sempor, Buayan, Gombong, dan Karanganyar.³⁰ Tradisi Jawa semacam gamelan, selamatan, dan wayang adalah pernyataan kultural golongan abangan.

Penduduk abangan mempunyai persamaan identitas dengan lurah, bersikap loyal dan kooperatif. Keadaan lingkungan inilah mengakibatkan lurah tetap berpengaruh sebagai penguasa tradisional ataupun legal. Ini karena tidak ada sistem status lain yang mengganggu hubungan antara lurah dengan abangan. Sementara itu golongan kasepuhan atau orang yang dituakan di desa akan berpihak pada lurah karena golongan inilah yang memegang peranan penting dalam upacara-upacara

²⁹ Clifford Greetz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989, hlm.347

³⁰ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 113.

selamatan, bersih desa, perayaan-perayaan dan perdukunan serta *petung*.³¹ Mayoritas masyarakat Kebumen beragama Islam, tetapi budaya lama tidak dihapuskan dan dibiarkan hidup. Pada akhirnya ritual-ritual yang didasarkan budaya itu membentuk kelompok Islam sendiri yang disebut golongan abangan.³²

Kiai yang di daerah Kebumen disebut *rama*, mempunyai status dan peranan yang mantap meskipun ketika itu telah terjadi perubahan-perubahan masyarakat. Kiai memelihara hubungan dengan santri melalui pengajian, khotbah, upacara doa, perayaan, dan kunjungan rumah. Hubungan murid-guru atau santri-kiai tampak sangat jelas dan erat.³³ Bagaimanapun juga kehadiran sebuah pondok pesantren di Somalangu, memerlukan legitimasi dari semua elit kiai di sekitarnya, bahkan lapisan tokoh agama Islam pada umumnya. Dalam babak ini, keabsahan dan dukungan masyarakat merupakan hal yang sangat bermakna. Lima elemen dasar pesantren, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri, dan kiai merupakan elemen pokok dalam masyarakat desa Somalangu.

Desa-desa di Kebumen terdapat dua kelompok *rural elite*, yaitu elit birokrasi (lurah) dan elit agama (kiai). Keduanya sama-sama mempunyai otoritas. Lurah dengan otoritas tradisional yang kemudian menjadi rasional dan kiai dengan otoritas

³¹Petung adalah ritual-ritual yang didasarkan pada budaya abangan. Contohnya seperti upacara obong dimana upacara perkawinan dilakukan dengan menggelar pesta tujuh hari tujuh malam. *Ibid.*

³²Danar, *loc.cit.*

³³*Ibid.*

kharismatik. Keduanya, sebagai elit penguasa dan elit agama mempunyai peranan yang cukup menonjol bagi suatu perubahan sosial. Lurah dijamin oleh tradisi dan hukum, kiai oleh kekeramatan perseorangan. Lurah adalah pewaris *little tradition*, sementara kiai adalah pewaris dari *great tradition*, yang pertama tradisi Jawa dan yang kedua tradisi Islam. Selama ekuilibrium sosial di desa terjaga, *rivalry*³⁴ antara elit birokrasi dan elit agama tidak akan berkembang menjadi konflik.

Lurah cenderung mendapatkan dukungan dari abangan dan juga dari birokrasi karena keanggotaannya dalam suatu formal group, kiai di lain pihak mendapat dukungan dari santri dalam suatu informal group. Hanya saja, revolusi ternyata telah menyentuh desa, maka terjadilah titik balik antara elit agama dan elit birokrasi. Dalam situasi politik yang tidak menentu, banyak warga masyarakat justru berlindung pada informal leader yaitu para kiai-kiai di desa. Persiapan-persiapan perang meimbulkan kecemasan penduduk yang menyebabkan penduduk mencari natural leader di tengah-tengah kekacauan tersebut. Natural leader pada saat-saat kekacauan fisik, psikis, ekonomis, etis, religius, atau politis, bukanlah pejabat-pejabat, tapi orang yang mempunyai kesanggupan badan dan batin, kekuatan yang dipercaya sebagai gaib yang tak dimiliki setiap orang. Dalam perspektif komunalisme

³⁴ Rivalry mempunyai dua bentuk, yaitu emulation (pertandingan) dan competition (persaingan). Emulation karena keduanya mempunyai hasrat untuk menyamai dan mengalahkan yang lainnya, dan juga competition karena mereka saling memperebutkan power (kekuasaan) di desa. Lurah cenderung mendapatkan dukungan dari abangan dan juga dari birokrasi karena keanggotaannya dalam suatu formal group, kiai di lain pihak mendapat dukungan dari santri dalam suatu informal group. Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 114.

itulah gerakan AUI lebih mudah dipahami sebagai suatu gerakan sosial, membangun kekuatan dirinya atas kesetiaan komunal.

AUI lahir sebagai wahana koordinasi ulama dan masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kehadiran para ulama itulah yang menjadikan AUI amat diterima masyarakat desa. Di pihak lain, kedudukan legal lurah sebagai kepala desa dan formal group semakin terancam. Dengan adanya dua group yang saling bersaing dan bertanding itu, mekanisme pemerintahan desa menjadi beku. Pada 1946, di tingkat desa dibentuk DPD (Dewan Perwakilan Desa) yang kemudian diubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan cara pemilihan yang bertugas membantu lurah. BPD inilah sebagai pengganti KNI di tingkat desa dan merupakan salah satu badan pemerintahan desa yang berkuasa disamping lurah. Selain itu berdiri Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) pada tahun pada 26 Agustus 1946. Pembentukan BPD di Kebumen tidak berjalan lancar. Keputusan-keputusan yang diambilnya tidak dapat diterima rakyat secara baik, bahkan ada kecenderungan rakyat menolaknya. Hal ini disebabkan oleh situasi masyarakat desa yang kacau dan mencekam. Angkatan Umat Islam (AUI) rupanya masih lebih berpengaruh di kalangan warga desa daripada BPD.

Meskipun demikian, dalam pandangan Angkatan Perang dan Pemerintah, lurah masih tetap dianggap sebagai satu-satunya pemimpin di tengah rakyat.³⁵ Sinyalemen ini tidak sesuai dengan kenyataan sosial di desa. Pada kondisi demikian

³⁵ A.H. Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya*, Jakarta: Pembimbing, 1953, hlm. 118.

dapat dimengerti mengapa kehadiran AUI mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat desa. Ketidakpercayaan masyarakat desa kepada *village bureaucracy* ditunjukkan oleh penyerbuan pemuda-pemuda AUI dari Kutawinangun dan Kedungwot terhadap lurah Gondanglegi (Kecamatan Ambal) pada pertengahan Juni 1948. Permasalahan ini dapat diselesaikan oleh kepolisian Kebumen dan Wedana Kutowingaun.³⁶ Inilah konflik antara santri dan abangan, atau antara kanan dan kiri. Selain itu, santri yang telah menjadi power group segera melakukan berbagai tindakan. Problem sosial desa seperti pelacuran dan perjudian yang dianggap sebagai ciri abangan segera dilarang. Kiai Mahfud selalu menanyakan masalah itu kepada kiai di desa. Tidak becusnya lurah mengatasi problem-problem seperti itu memang telah menjengkelkan para santri. Dan ketika santri mampu melakukan sesuatu untuk mengatasinya, lurah merasakannya sebagai pelanggaran kekuasaannya, sebab sejak lama santri menentang lurah, bahkan sewaktu santri masih dalam keadaan kelompok minoritas.

AUI mulai membuat peraturan-peraturan khusus mengenai ketataprajaan, yang sifatnya lepas dan sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah RI setempat. Terjadi kekacauan dalam kehidupan di daerah dimana AUI berkuasa. Sejak itu para petugas Pemerintah, khususnya pamong praja mulai mendapat

³⁶ Panitia Peringatan 17 Agustus 1953, *1 Windu Kebumen Berdjuaug*, Kebumen: Bagian Penerangan Kabupaten Kebumen, 1953, hlm. 11.

kesulitan.³⁷ Para Lurah sebagai salah satu elemen elit desa, mencari perlindungan pada Angkatan Perang. Sedangkan, warga desa memperoleh perlindungan dari para pemimpin informal yaitu kiai-kiai desa. Usaha-usaha untuk memperkuat desa dan birokrasi lewat pembentukan Payer Desa (Pasukan Gerilya Desa) dengan instruksi dari MBKD (Markas Besar Komando Djawa) No. 11/MBKD/49 di Kebumen, tidak banyak mengubah kekuatan di desa.

Bertambah kuatnya peranan para pemimpin agama Islam dan masa kekerasan yang terus menerus dalam melawan pemerintah kolonial, menyebabkan banyak petani yang melarikan diri dan berlindung di bawah para pemimpin Islam, selanjutnya mereka menjadi santri. Pada kenyataannya batas antara agama dan politik sangat tipis, terutama ide perang jihad memainkan peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan semangat juang pada jiwa petani. Hal tersebut kadangkala menimbulkan pergolakan yang hampir dapat dipastikan berpusat di sekitar para pemimpin Islam.³⁸

Peran para kiai desa dalam menggerakkan masyarakat bertempur melawan Belanda amat besar. Integritas politik, sebagai prasyarat terwujudnya nasionalisme di pedesaan, amat bergantung kepada sistem hubungan kewibawaan tradisional yang menjiwai kehidupan sosial desa serta mempertalikan setiap desa dengan dunia politik

³⁷ Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya*, Semarang: Borobudur Megah, 1977, hlm. 471.

³⁸ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1985, hlm. 64.

daerah dan nasional yang ada di balik pintu gerbang desa.³⁹ Dalam konteks ini dapat dimengerti, tampilnya AUI yang demikian besar dalam menegakkan kemerdekaan setidak-tidaknya di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa peran para pemimpin agama cukup besar.

C. Kontroversi Gerakan Angkatan Umat Islam (AUI)

Kedewasaan suatu bangsa antara lain ditentukan oleh kemampuan bangsa itu memahami dirinya secara kritis dan keberaniannya mencari hal-hal yang bermakna dari masa lampaunya.⁴⁰ Kaitannya dengan itu ialah bahwa tulisan ini memberanikan diri untuk mengungkap suatu gerakan sosial di tingkat lokal yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen pada tahun 1950. Mengapa mereka dikatakan bagian dari pemberontakan DI/TII Jawa Barat merupakan fokus permasalahan tulisan ini.

Terdapat beberapa studi tentang AUI sebelumnya. Buku yang disusun Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro⁴¹ menjelaskan bahwa Pemberontakan AUI di Kebumen dilatarbelakangi ketidakpatuhan AUI terhadap perintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh alat-alat negara Republik Indonesia setelah

³⁹ Karl D. Jackson, *loc.cit.*

⁴⁰ Barbara Sillar Harvey, *Permesta, Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti, 1984, hlm. xiii.

⁴¹ Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro, *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianya*, Semarang: Borobudur Megah, 1977.

pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. AUI adalah suatu organisasi Islam yang berdiri sendiri yang dipimpin Kiai Mahfud. Dalam melaksanakan ideologi dan cita-citanya, Kiai Mahfud dibantu oleh Nursidik dan Kiai Taifur. Pengaruh Kiai Mahfud yang begitu besar dan mendalam bagi pengikutnya menimbulkan fanatisme dan bapakisme di daerah Kebumen. AUI mulai membuat peraturan-peraturan khusus mengenai ketataprajaan, yang sifatnya lepas dan sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah RI setempat. Terjadi kekacauan dalam kehidupan di daerah dimana AUI berkuasa. Sejak itu para petugas Pemerintah, khususnya pamong praja mulai mendapat kesulitan.

AUI mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Ketidakpatuhan AUI terhadap peraturan Pemerintah menimbulkan ketegangan-ketegangan antara AUI dengan RI. Musyawarah yang diajukan untuk menyelesaikan pertikaian paham antara kedua belah pihak ditolak AUI. Pemerintah RI mengambil tindakan tegas dengan mengerahkan segala alat kekuasaannya terhadap AUI karena pembangkangan AUI dianggap sebagai pemberontakan terhadap Pemerintah yang sah. Dari gejala-gejala yang terjadi telah menunjukkan bahwa AUI telah berkembang sejalan dan senafas dengan cita-cita pembentukan Negara Islam konsepsi Kartosuwiryo.⁴²

Pertempuran terjadi antara pihak AUI dengan Pemerintah pada tanggal 30 Juli 1950. Gempuran-gempuran pihak Tentara Republik membuat pasukan AUI terdesak

⁴² *Ibid*, hlm. 471.

ke daerah Somalangu. Pengepungan dan serangan pasukan RI terhadap pasukan AUI mengakibatkan pasukan AUI terpecah belah. Pasukan AUI di bawah pimpinan Kiai Mahfud bertahan di daerah Banyumas dengan kekuatan sekitar 600 orang. Kelompok lain di bawah pimpinan Nursidik dengan pasukannya yang berjumlah sekitar 200 orang melarikan diri ke daerah Brebes dan Tegal untuk bergabung dengan DI/TII disana. Kiai Mahfud tewas dalam pertempuran di Gunung Srandil yang berada di daerah Cilacap. Sisa-sisa pasukan AUI yang masih hidup berusaha melarikan diri ke daerah Gombong dan Brebes. Batalyon 405 menerima sisa-sisa pasukan AUI yang lari ke Brebes yang kemudian menggabungkan diri dengan DI/TII di daerah GBN. Dengan bergabungnya sisa-sisa pasukan AUI ke daerah Brebes dan Tegal membuat pasukan DI/TII Amir Fatah semakin kuat.⁴³

Buku lain yang disusun oleh Dinas Sejarah TNI AD⁴⁴ memberikan gambaran mengenai mengapa rakyat Indonesia ikut dalam gerakan Darul Islam. Pertanyaan mengapa rakyat ikut Darul Islam dijelaskan oleh penyusun dengan memberikan empat alasan. Alasan pertama adalah kebencian berhubung bertambah kuatnya pengaruh Tentara Republik dan kaitannya dengan rendahnya posisi laskar-laskar bersama dengan politik demobilisasi yang dijalankan pemerintah. Alasan kedua adalah bertambahnya pengawasan Pemerintah Republik atas provinsi-provinsi segera sesudah kemajuan tentaranya. Alasan yang ketiga adalah mengenai norma dan nilai

⁴³ Ibid, hlm. 474.

⁴⁴ Dinas Sejarah Militer TNI, *Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dan Penumpasannya*, Bandung: Disjarah TNI AD, 1982.

yang berubah mengenai pemikiran tanah. Alasan yang terakhir adalah peranan yang dimainkan agama.

Kajian tentang AUI juga menjadi bagian dari tulisan Cornelis van Dijk⁴⁵ tentang Darul Islam. Dalam bukunya itu Van Dijk menjelaskan bahwa pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah berasal dari tiga kelompok yang berbeda-beda. Salah satu kelompok berasal dari pantai utara, di kabupaten-kabupaten sebelah timur perbatasan Jawa Barat, terutama Brebes dan Tegal, yang merupakan inti Darul Islam untuk Jawa Tengah. Darul Islam ini dipimpin Amir Fatah. Kelompok ini mendapat ilham dan sebagian gerakannya diawasi oleh DI/TII Jawa Barat. Kelompok kedua adalah kelompok yang terbentuk dari para pembelot di Divisi Diponegoro, yaitu dari Batalyon 426. Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang berakar pada Angkatan Umat Islam di Kebumen yang menentang Pemerintah Indonesia.

Van Dijk mengelompokkan AUI menjadi bagian DI/TII Jawa Tengah sejajar dengan gerakan Amir Fatah dan pemberontakan Batalyon 426. AUI di bawah pimpinan Kiai Mahfud ikut aktif berjuang dalam rangka mempertahankan Republik Indonesia yang baru diproklamirkan dengan cara yang diperintahkan Allah dan ditunjukkan Rasul. Selain itu AUI juga bermaksud mengkonsolidasikan kesetiaan

⁴⁵ Cornelis van Dijk. *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers. 1983.

masyarakat Islam pada agama Islam.⁴⁶ Salah satu tujuan yang dianut Angkatan Umat Islam yang dipimpin Kiai Somalangu pada saat pembentukannya adalah terciptanya suatu negara Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun hal itu tidak terjadi pertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Sesudah Konferensi Meja Bundar timbul pertentangan antara AUI dengan RI karena syarat-syarat yang disepakati dalam KMB ditolak AUI.

Ketidakpatuhan pihak AUI terhadap perintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh alat-alat negara menimbulkan ketegangan-ketegangan antara pihak AUI dengan RI. Pertentangan yang timbul kemudian dipebesar oleh upaya-upaya Pemerintah untuk mengekang pengaruh AUI di Kebumen. Upaya perdamaian lewat jalur perundingan yang dilakukan Pemerintah Indonesia ditolak AUI. Undangan untuk berunding di Purworejo dengan Tentara dan Pemerintah Republik ditolak Kiai Mahfud. Kiai Mahfud juga menolak menerima wakil-wakil Pemerintah maupun Tentara yang mendatangi bentengnya di Somalangu, begitu juga utusan dari Masyumi dan Kiai Wakhid Hasyim selaku Menteri Agama Republik Indonesia Serikat.⁴⁷

Pertempuran antara AUI dengan Tentara Republik terjadi pada tanggal 30 Juli 1950 sehari sebelum berakhirnya ultimatum Tentara. Pasukan Pemerintah berhasil

⁴⁶ Djawa Tengah, *Republik Indonesia: Provinsi*, Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 63.

⁴⁷ Cornelis van Dijk. *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers. 1983, hlm. 137.

menceraikan pasukan AUI setelah satu bulan bertempur. Satu divisi yang beranggotakan 200 gerilya yang dipimpin oleh Nursidik bergerak menuju ke Brebes dan Tegal untuk Bergabung dengan pasukan Darul Islam Amir Fatah. Nursidik tewas pada tanggal 26 Agustus 1950 di dekat Kroya. Sisa-sisa pasukannya lari ke Brebes dan Tegal yang akhirnya menjadi anggota DI/TII Jawa Tengah.⁴⁸

Kuntowijoyo⁴⁹ menulis makalah tentang AUI ditinjau dari struktur dan fungsi sosialnya untuk melihat seberapa jauh corak organisasi sosialnya telah menempatkan pergerakan AUI dalam posisi sebagai gerakan sosial. AUI sebagai gerakan sosial tidak dapat dilepaskan dengan kharisma dari tokoh Kiai Mahfud Abdurrahman. Kiai Mahfud inilah yang dijadikan messiah oleh para anggota AUI dalam menghadapi kekacauan dan konflik dengan birokrasi RIS. Kuntowijoyo membahas tentang konflik sosial yang terjadi di Kebumen terkait analisisnya tentang kekuasaan elit dan kelompok sosial di pedesaan serta penyebab terjadinya pemberontakan AUI.

Kuntowijoyo menjelaskan bahwa kasus AUI adalah suatu problem sosial. AUI bukan semata-mata suatu badan kelaskaran, tetapi suatu pergerakan sosial. Di desa terdapat dua kelompok *rural elite*, yaitu elit birokrasi (lurah) dan elit agama (kiai). Keduanya sama-sama mempunyai otoritas. Lurah dengan otoritas tradisional yang kemudian menjadi rasional dan kiai dengan otoritas kharismatik. Keduanya,

⁴⁸ Dinas Sejarah Militer TNI, *Sejarah Perjuangan TNI AD*, Bandung: Disjarah TNI AD, 1972, hlm. 246.

⁴⁹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.

sebagai elit penguasa dan elit agama mempunyai peranan yang cukup menonjol bagi suatu perubahan sosial. Lurah dijamin oleh tradisi dan hukum, kiai oleh kekeramatan perseorangan. Lurah adalah pewaris *little tradition*, sementara kiai adalah pewaris dari *great tradition*, yang pertama tradisi Jawa dan yang kedua tradisi Islam. Selama ekuilibrium sosial di desa terjaga, rivalry antara elit birokrasi dan elit agama tidak akan berkembang menjadi konflik. Hanya saja, revolusi ternyata telah menyentuh desa, maka terjadilah titik balik antara elit agama dan elit birokrasi. Dalam situasi politik yang tidak menentu, banyak warga masyarakat justru berlindung pada informal leader yaitu para kiai-kiai di desa. Persiapan-persiapan perang meimbulkan kecemasan penduduk yang menyebabkan penduduk mencari *natural leader*⁵⁰ di tengah-tengah kekacauan tersebut. Melihat dari perspektif komunalisme itulah gerakan AUI lebih mudah dipahami sebagai suatu gerakan sosial, membangun kekuatan dirinya atas kesetiaan komunal.

AUI lahir sebagai wahana koordinasi ulama dan masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kehadiran para ulama itulah yang menjadikan AUI amat diterima masyarakat desa. Kedudukan legal lurah sebagai kepala desa dan formal group semakin terancam. Akibat adanya dua group yang saling bersaing dan bertanding itu, mekanisme pemerintahan desa menjadi beku. Pada 1946, di tingkat desa dibentuk DPD (Dewan Perwakilan Desa) yang kemudian diubah menjadi Badan

⁵⁰ Natural leader pada saat-saat kekacauan fisik, psikis, ekonomis, etis, religius, atau politis, bukanlah pejabat-pejabat, tapi orang yang mempunyai kesanggupan badan dan batin, kekuatan yang dipercaya sebagai gaib yang tak dimiliki setiap orang. *Ibid.*, hlm. 115.

Perwakilan Desa (BPD) dengan cara pemilihan yang bertugas membantu lurah. BPD inilah sebagai pengganti KNI di tingkat desa dan merupakan salah satu badan pemerintahan desa yang berkuasa disamping lurah. Selain itu berdiri Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) pada 26 Agustus 1946. Pembentukan BPD di Kebumen tidak berjalan lancar. Keputusan-keputusan yang diambilnya tidak dapat diterima rakyat secara baik, bahkan ada kecenderungan rakyat menolaknya. Hal ini disebabkan oleh situasi masyarakat desa yang kacau dan mencekam. Angkatan Umat Islam (AUI) rupanya masih lebih berpengaruh di kalangan warga desa daripada BPD.

Meskipun demikian, dalam pandangan Angkatan Perang dan Pemerintah, lurah masih tetap dianggap sebagai satu-satunya pemimpin di tengah rakyat.⁵¹ Sinyalemen ini tidak sesuai dengan kenyataan sosial di desa. Pada kondisi demikian dapat dimengerti mengapa kehadiran AUI mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat desa. Ketidakpercayaan masyarakat desa kepada *village bureaucracy*⁵² ditunjukkan oleh penyerbuan pemuda-pemuda AUI dari Kutawinangun dan

⁵¹ A.H. Nasution, *Pokok-pokok Gerilya: Dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang Lalu dan yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa, 1984, hlm. 118.

⁵² Bureaucracy atau birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan. Akhmad Setiawan, *Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 143.

Kedungwot terhadap lurah Gondanglegi (Kecamatan Ambal) pada pertengahan Juni 1948. Permasalahan ini dapat diselesaikan oleh kepolisian Kebumen dan Wedana Kutowingaun.⁵³ Inilah konflik antara santri dan abangan.

Perubahan yang cepat dalam revolusi, dan juga kekacauan perang, telah membawa disorganisasi pribadi dan sosial di masyarakat Kebumen dan di organisasi AUI pada khususnya. Anggota AUI yang mula-mula berniat menjadi sukarelawan untuk melaksanakan jihad, dan kemudian akan kembali ke pondok pesantren setelah perang selesai. Tetapi setelah itu mereka menghadapi problem-problem, antara lain: 1. Menjadi tentara tetap atau tidak; 2. Bila masuk APRIS, maka senjata yang dulu dimiliki kini bukan lagi menjadi haknya; 3. Beberapa batalyon APRIS dicurigai sebagai komunis; 4. AUI harus bubar atau terus; 5. Ada usaha mutasi personil dan tempat bagi Batalyon Lemah Lanang dalam rangka agar mereka dapat dipecah-pecah; 6. Suatu disiplin rasional tidak terlalu tepat untuk mereka; 7. Demobilisasi akan membawa problem baru; 8. Mereka sendiri terlalu terisolasi, sehingga menyusahkan kerja sama dengan pasukan lain; 9. Persaingan yang terjadi antar pasukan telah berkembang menjadi konflik; dan 10. Mereka takut menghadapi hal-hal baru.⁵⁴

Anggota AUI terdiri atas petani dan tidak terdapatnya golongan menengah yang reseptif di kalangan mereka. AUI cenderung kembali ke basisnya menjadi suatu komunitas tertutup, semacam revivalisme dari pondok dengan santri sebagai pelaku

⁵³ Panitia Peringatan 17 Agustus 1953, *Satu Windu Kebumen Berjuang*, Kebumen: Bagian Penerangan Kabupaten Kebumen, 1953, hlm. 11.

⁵⁴ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 119.

utamanya. Dalam tubuh AUI tampak terdapat apa yang disebut *cultural lag*, sehingga terdapat jarak antara kota-desa, nasional-lokal, modernisme-revivalisme, atau masyarakat terbuka-masyarakat tertutup. *Intellegentsia*⁵⁵ AUI yang mempunyai tugas lebih dari sekitarnya sehingga tidak menjalankan peranannya secara maksimal. Pesantren atau pondok yang seperti desa pada umumnya cenderung mempunyai otonomi, tidak merasa perlu akan adanya tambahan, timbal-balik dan subordinasi. Pesantren tetap bertahan untuk suatu *little community* dengan corak yang homogen, lamban, dan merasa cukup pada diri sendiri.⁵⁶ Anggota AUI mengharapkan seorang messiah yang akan membawa mereka keluar dari kekacauan. Messiah itu tak lain adalah Kiai Mahfud itu sendiri. Situasi ini menjadikan pimpinan AUI terseret untuk kembali kepada otoritas karismatis dan mempermanenkannya dan itu berarti menghadapkannya dengan birokrasi, yaitu RIS.

Perubahan dari *guerilla forces* ke *regular army* yang diusahakan oleh pemerintah mempunyai dampak tertentu bagi AUI. Otonomi dalam politik dan ekonomi yang diperlukan dalam perang gerilya, telah dilaksanakan oleh AUI dengan baik. Selama ini AUI sama sekali otonom, tidak ada subordinasi dari birokrasi pemerintah atau angkatan perang. Mitos tentang kekuatan diri sangat dikenal begitu

⁵⁵ Intelligence atau kecerdasan adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 135.

⁵⁶ Kuntowijowo, *op.cit.*, hlm. 120.

AUI banyak melakukan keberanian dan kesuksesan dalam perang gerilya memunculkan apa yang disebut warlordisme pada tahun 1950an. Selama ini AUI merupakan suatu power group yang berpengaruh, tapi tak cukup dapat berbuat banyak karena bukan ruling class. Kuntowijoyo menyimpulkan bahwa lebih dari segalanya kasus AUI adalah problem sosial. AUI bukan semata-mata suatu badan kelaskaran, tetapi suatu pergerakan, suatu *abortive social movement*. Pergerakan sosial itu abortif⁵⁷ karena ia mati sebelum semua gejalanya terucapkan. Pada hakikatnya, AUI bisa diterjemahkan sebagai gerakan atau reaksi para santri di pedesaan terhadap birokrasi.

Sugeng Priyadi⁵⁸ menjelaskan lingkungan sosio-kultural dan kondisi masyarakat Kebumen yang mendorong lahirnya organisasi AUI di bawah pimpinan Kiai Somalangu, peran kaum santri dalam memobilisasi sosial di Kebumen pada peristiwa AUI, serta timbulnya pertentangan atau konflik antara AUI dengan pihak APRIS dan proses penyelesaian masalah AUI menunjukkan bahwa AUI lebih tampak sebagai suatu problem sosial. Ketika revolusi telah selesai, para kiai dan santri berada pada dua pilihan, yaitu menjadi tentara atau tetap santri. Pilihan pertama sulit ditempuh karena AUI tidak mudah bekerjasama dengan kelompok lain dan kedisiplinan APRIS tidak cocok bagi kelaskaran AUI. Dalam kondisi kritis itu,

⁵⁷ Pergerakan sosial yang abortif adalah suatu pergerakan sosial gagal mencapai sasaran pergerakannya. *Ibid.*, hlm. 122.

⁵⁸ Sugeng Priyadi, *Sejarah dan Kebudayaan Kebumen*, Yogyakarta: Jendela, 2004.

mereka membutuhkan pemimpin kharismatik dan mereka memilih Kiai Mahfud Abdurrahman yang akhirnya terjadi konflik antar AUI dengan APRIS.⁵⁹

Karya lain yang membahas AUI adalah penelitian Sulistiyono yang menjelaskan pemberontakan AUI dengan pendekatan sosial ekonomi, budaya politik sosial psikologi. Hasil penelitian menunjukkan ada enam faktor yang menyebabkan timbulnya pemberontakan, yakni: 1. Situasi ekonomi yang buruk; 2. keagamaan; 3. ketidakpuasan terhadap segala kebijakan pemerintah serta mundurnya golongan berkepala batu; 4. Adanya pemimpin kharismatik revolusioner yang mampu memberikan landasan bagi gerakan pemberontakan; 5. Ada organisasi yang dapat digunakan untuk mengerahkan dan memobilisasi sumber-sumber daya dan material; 6. Adanya pergulatan yang laten antara elite formal dengan elite nonformal. Pemberontakan AUI pada hakikatnya adalah gerakan keagamaan yang bercorak Islam. Namun, konflik-konflik yang terdapat pada pemberontakan AUI merupakan antagonisme laten sebagai warisan sejarah dalam bentuk pergulatan antarelite, elite formal dan nonformal, golongan tradisional dan modernis, serta santri dan abangan.⁶⁰

Studi kasus tentang gerakan sosial AUI juga ditulis oleh Danar Widiarta⁶¹ dalam Jurnal Sejarah. Gerakan sosial (*social movement*) sebagai gejala sejarah

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁰ Singgih Tri Sulistiyono, *Pemberontakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen 1950*, Semarang: Mimbar, 2000.

⁶¹ Danar Widiarta, "Angkatan Oemat Islam 1949-50, Studi tentang Gerakan Sosial di Kebumen". *Jurnal Sejarah* Vol. 6, No. 1, Agustus 2004.

senantiasa menarik karena di dalamnya terdapat proses dinamis dari kelompok sosial yang dimobilisasikan oleh tujuan ideologis. Dalam gerakan sosial tercakup tiga komponen yang esensial yaitu kepemimpinan, ideologi dan organisasi. Kepemimpinan dalam badan perjuangan AUI memiliki otoritas kharismatik yang bersumber pada *prestige* (wibawa) pribadi antara lain karena pengetahuan, keterampilan, kreativitas, inisiatif, keberanian moral dan sebagainya. Ideologi dalam badan perjuangan dapat digolongkan dalam tiga kategori, yakni: 1. radikal-kiri, komunis, sosialis; 2. keagamaan, terutama Islam; 3. nasionalis.⁶² AUI termasuk organisasi berdasarkan ideologi keagamaan dalam hal ini agama Islam. Organisasi dalam badan perjuangan masih dipengaruhi oleh ikatan *patron-client*. Di sini tidak terdapat ikatan radikal semata-mata namun ada aspek sentimentilnya. Bapakisme menunjukkan hubungan pribadi antara pemimpin dengan pengikutnya, seperti halnya dalam patrimonialisme dalam kerajaan.

AUI lahir sebagai organisasi sosial kelaskaran dengan dasar utama Islam. Tokoh sentral dalam AUI adalah Kiai Haji Mahfud Abdurrahman. Sebagian besar anggota AUI adalah petani desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah tetapi memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap Kiai Mahfud. Dalam konsep pemikiran AUI, Kiai Mahfud adalah figur mesias yang mendatangkan kemakmuran. Status kepemimpinan dalam masyarakat, kecakapan, keberanian, kekeramatan dan

⁶² Sartono Kartodirjo, *Peranan Badan Badan Perjuangan dalam Revolusi Indonesia*, makalah seminar Seminar Revolusi Kepahlawanan dan Pembangunan Bangsa di Museum Banteng, Yogyakarta, hlm. 14.

kesalehan berpengaruh besar pada derajat loyalitas masyarakat desa kepada para kiai dari AUI.

Rasionalisasi dalam tubuh militer setelah pengakuan kedaulatan menjadi persoalan bagi AUI antara melebur menjadi satu dengan APRIS atau tidak. Rasionalisasi menyebabkan terganggunya badan perjuangan AUI, timbul ketidaksesuaian sosial, munculnya perasaan tidak aman dan frustrasi di kalangan luas. Deprivasi muncul karena mereka terancam kehilangan kedudukan sosial ekonominya, kehilangan hak-hak politiknya atau kehilangan warisan kulturalnya. Deprivasi itulah yang menyebabkan munculnya gerakan sosial AUI di Kebumen.⁶³

Gerakan sosial yang dilancarkan AUI di Kebumen gagal mencapai tujuannya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama adalah faktor sumber daya manusia yang terdiri atas kepemimpinan, organisasi dan keterlibatan masyarakat. Kepemimpinan yang didasarkan atas kharisma seseorang tidak selalu membawa hasil. Meninggalnya Kiai Mahfud sebagai pemimpin sentral AUI telah menyebabkan pengikutnya kehilangan semangat untuk meneruskan perjuangannya. Sifat keanggotaan yang bebas dalam organisasi serta hanya bertumpu pada para pemimpinnya saja pada gilirannya membuat koordinasi antarcabang dan ranting sulit dilakukan. Keterlibatan masyarakat yang hanya didasarkan pada dorongan moral dan bukan atas dasar tujuan yang jelas juga menjadi salahsatu faktor gagalnya gerakan sosial di Kebumen.

⁶³ Danar Widiarta, Angkatan Oemat Islam 1949-50, Studi tentang Gerakan Sosial di Kebumen. *Jurnal Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2004, hlm. 41.

Faktor kedua adalah faktor saran dan prasarana yang menyangkut masalah dana, logistik dan persenjataan. Masalah dana, logistik dan persenjataan AUI tidak memadai untuk perlawanan jangka panjang. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Anggota AUI harus bertempur melawan teman-teman mereka sendiri selama perang kemerdekaan. Secara psikologis hal itu tidak menguntungkan meskipun mereka mempunyai keyakinan bahwa yang mereka perangai adalah kekafiran. Perpecahan di dalam tubuh AUI menyikapi terbentuknya APRIS, secara psikologis juga mengganggu pikiran dan perasaan para anggota AUI.⁶⁴

K.H. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur dilahirkan di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, 4 Agustus 1940 dan menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode 1999-2001.⁶⁵ Pemikiran-pemikiran Gus Dur merupakan cerminan dari kenyataan yang memiliki wilayah jelajah yang teramat luas, kompleks, dan multidimensional. Dalam banyak tulisannya sering membahas tentang hubungan sipil dan militer di Indonesia dan juga ketidakadilan dalam masyarakat. Salah satu bahasan dari tulisan Gus Dur adalah tentang ketidakadilan yang diterima masyarakat yang telah dicap oleh negara sebagai pemberontak karena dituduh telah melakukan aksi makar atau pemberontakan terhadap NKRI walaupun belum tentu tuduhan tersebut terbukti secara hukum.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Greg Barton, *Biografi Gus Dur "The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS, 2009. hlm. 25

Selama lebih dari 30 tahun, TNI pernah berkuasa di negeri ini, banyak kecurigaan selalu diarahkan kepada TNI. Segala macam hal yang menunjukkan melemahnya pemerintahan dan tereduksinya kebebasan bagi masyarakat sipil (civil society) selalu dianggap upaya TNI untuk berkuasa kembali. Dalam hal ini, Gus Dur berpendapat hendaknya kita berhati-hati dengan tidak melakukan generalisasi atas TNI sebagai lembaga. Memang ada oknum yang mengejar ambisi pribadi, seperti memandang peran TNI dalam politik amat diperlukan guna kelangsungan hidup bangsa ini, namun kenyataannya peran seperti itu tidak akan pernah bisa. Struktur serta hierarki TNI sendiri bertopang atas ketundukan mutlak atas atasan, sehingga tidak memungkinkan TNI berperan demokratis tanpa kehadiran sipil dalam pengendalian keadaan. Karena itu, demokratisasi sendiri harus dilakukan bangsa ini bersama, termasuk ditopang kemauan TNI sebagai institusi.⁶⁶

Gus Dur lahir di lingkungan orang-orang militer. Pamannya, K.H. A. Chaliq Hasyim sudah menjadi Mayor Jenderal di Divisi Brawijaya sejak tahun 1948. K.H. A. Chaliq Hasyim adalah salah seorang pendiri BRANI (Barisan Rakyat Nasional Indonesia) yang menjadi cikal bakal jaringan lembaga intelijen kita. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim adalah penasihat Panglima Besar Soedirman, yang paruh kedua tahun 1940-an mempunyai dua penasihat, yaitu K.H. Wahid Hasyim sebagai penasihat sosial politik dan Sekarmadji Kartosuwiryo sebagai penasihat militer. Panglima Besar Soedirman mematuhi Perjanjian Renville, yang mengharuskan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

Republik Indonesia menarik tentara dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kemudian Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kartosuwiryo membentuk Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) guna mengisi kekosongan itu. Namun setelah Kartosuwiryo gagal merebut jabatan Gubernur Jawa Barat dan menggunakan DI/TII untuk memberontak, barulah Kartosuwiryo menjadi musuh negara. Lagi-lagi kisah individu yang kalah bersaing lalu memberontak kepada negara, sama dengan warga TNI individual yang menganggap kaum militer paling berhak mengendalikan negara. Adanya beberapa doktrin yang dikembangkan TNI yang memerlukan koreksi karena di dalamnya ada dominasi kaum militer yang beranggapan mereka lebih baik daripada pihak sipil.⁶⁷

Hubungan antara warga negara sebagai individuan negara sebagai individu dan negara sebagai kolektivitas pemerintahan kembali mencuat ke permukaan, sebagai isu perdebatan dan refleksi pemikiran, dalam beberapa tahun terakhir ini. Persoalan yang muncul antara lain penerapan hak-hak asasi manusia, perlakuan lebih adil kepada pekerja, bersihnya pemerintahan dari korupsi dan lain-lain. Indonesia mendirikan badan-badan khusus atau semiformal untuk memberikan responsi yang tidak merugikan apa yang dirumuskan pemerintahan sebagai kepentingan nasional di satu sisi dan apa yang dianggap benar mencukupi tuntutan-tuntutan baru dalam

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

hubungan internasional. Contoh lembaga seperti itu adalah Komite Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).⁶⁸

Dilihat dari sudut pandang hubungan internasional, berubahnya perimbangan antara hak-hak individu warga negara dan wewenang pemerintahan di negara-negara berkembang itu menunjukkan adanya pergeseran sikap kolektif dari bangsa-bangsa di dunia secara keseluruhan, menuju sebuah tahap baru dalam perkembangan peradaban manusia. Setelah umat manusia, dalam sejarahnya yang panjang, menyaksikan penindasan dan pengingkaran hak-hak asasi manusia sebagai sesuatu yang diterima secara umum, kini seolah-olah sebuah fajar baru telah menyingsing, membawakan impian sebuah masyarakat universal yang disifati oleh terpenuhinya harkat dan martabat manusia secara utuh. Mungkin sebuah impian yang terlalu indah, tetapi harapan akan masyarakat baru itulah yang menggerakkan berbagai tuntutan dan gugatan yang dialamatkan kepada pemerintah semiotoriter, otoriter dan totaliter di hampir semua kawasan dunia.

Sebuah kasus cukup menarik untuk dikemukakan adalah kasus yang terjadi di Kebumen. Kiai Mahfud Sumolangu adalah pahlawan yang memerangi bala tentara pendudukan Belanda di Banyumas Selatan. Ketika kabinet Hatta memutuskan rasionalisasi TNI atas usul Jenderal Besar A.H. Nasution, antara lain berupa ketentuan bahwa komandan batalyon TNI haruslah berijazah dan ijazah hanya dibatasi pada keluaran beberapa lembaga pendidikan saja (tidak termasuk pesantren),

⁶⁸Addurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Buku Kompas, 2010, hlm.111.

maka Kiai Sumolangu tidak diperkenankan menjadi komandan batalyon di Purworejo karena terhadang oleh ketiadaan ijazah yang dipunyainya dan sebagai gantinya diangkat seorang perwira muda bernama A. Yani. Akibatnya, Kiai Sumolangu mendirikan Angkatan Umat Islam (AUI) yang kemudian dinyatakan melakukan pemberontakan. Peristiwa tragis itu terjadi pada awal tahun 1950-an, namun bekasnya yang pahit masih tersisa sampai sekarang.⁶⁹

Merujuk penuturan KH Afifuddin Chanif al-Hasani dan KH Musyaffa Ali akar masalah AUI sejatinya terletak pada kebijakan Rera (restrukturisasi dan rasionalisasi) yang dikumandangkan kabinet Hatta pada 1948 atas usulan Wakil Panglima Besar AH Nasution. Dalam program Rera ini, laskar-laskar perlawanan akan digabungkan menjadi satu ke dalam TNI dan diciutkan personalianya hingga tinggal setengah dari semula. Prioritas ditujukan pada mereka yang mendapatkan pendidikan militer zaman Hindia Belanda maupun Jepang. Sebagai pimpinan badan kelaskaran terbesar di Jawa Tengah, dengan massa sekitar 10.000 orang dan punya potensi massa tambahan 30.000 orang, Kiai Mahfud risau dengan kebijakan diskriminatif ini mengingat mayoritas massa AUI memiliki tingkat pendidikan formal rendah dan berbasis pesantren sehingga berpotensi tereliminir karena tak punya ijazah. Meski sebagian besar massa AUI semula merupakan petani, tak pelak bahwa

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

perjalanan Perang Kemerdekaan telah menarik sebagian diantaranya untuk bermobilitas vertikal menjalani karir militer.⁷⁰

Keresahan bertambah mengingat pada 1948 itu Indonesia justru masih berhadapan dengan ancaman kekuatan NICA, yang bagi Kiai Mahfud sangat nyata, mengingat sebagai ketua PPRK (Panitia Pertahanan Rakyat Kebumen) yang berkedudukan langsung di bawah Bupati Kebumen, beliau langsung berhadapan dengan pasukan NICA di garis demarkasi Sungai Kemit, Gombong timur. Sehingga menurut Kiai Mahfud tidaklah bijak menggagas Rera justru ketika ancaman nyata menghadang di depan mata.

Keresahan yang sama juga dihadapi faksi sosialis-komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pimpinan Amir Syarifuddin di Madiun. Namun FDR memilih menyelesaikannya dengan mengobarkan kudeta setengah hati Madiun yang gagal pada September 1948, peristiwa yang menguras energi laskar-laskar rakyat dan TNI terlalu banyak untuk menumpasnya. Penumpasan FDR ini membuat Syekh Mahfud dan PPRK semakin yakin NICA tinggal menunggu waktu saja untuk menjebol garis demarkasi Sungai Kemit dan menyerbu jauh ke Yogyakarta sebagai ibukota RI.

Keresahan Kiai Mahfud terbukti ketika NICA menggelar kampanye militer Doorstot naar Djokdja pada 18 Desember 1948, yang berhasil menawan Soekarno-Hatta, menghancurkan kabinet Hatta dan membuat TNI serta laskar-laskar tercerai

⁷⁰ Wawancara KH. Afifuddin Chanif Al Hasani tanggal 22 Juni 2014.

berai. Ini menginisiasi masa Perang Kemerdekaan II yang sekaligus membenamkan ide Rera ala Nasution. Dalam periode inilah peranan AUI kian menanjak dalam percaturan politik dan militer di Jawa Tengah.⁷¹

Perang usai seiring penandatanganan pengakuan kedaulatan di Istana Rijswijk, 27 Desember 1949, sebagai realisasi Konferensi Meja Bundar. Ini sekaligus menandai berdirinya RIS dengan APRIS sebagai tentara nasionalnya. Pembentukan APRIS membawa konsekuensi tersendiri bagi AUI seiring kembali mencuatnya isu Rera.

Tawaran APRIS agar AUI bergabung kedalamnya melalui Rera yang diskriminatif berpotensi menghasilkan sedikitnya empat ancaman: ancaman eksistensi organisasi, ancaman kehilangan posisi sosial ekonomis, ancaman kehilangan posisi politis dan ancaman kehilangan posisi budaya. Ini menghasilkan kondisi AUI tidak lagi otonom, tidak lagi merasa aman dalam posisinya dan frustrasi dengan masa depannya. Ini yang membuat Kiai Mahfud menolak bergabung.⁷²

Namun dari penuturan KH. Musyaffa, atas bujukan H. Nursodik dan KH. Sururudin sebenarnya Kiai Mahfud telah bersedia berunding dengan APRIS untuk membicarakan kemana AUI hendak diarahkan, mengingat jasanya yang demikian besar. Perundingan mengerucut pada kompromi dengan pembentukan Batalyon Lemah Lanang, yang khusus menampung massa AUI yang diseleksi sendiri oleh Kiai

⁷¹ Wawancara KH. Amallul Umam tanggal 5 Juni 2014.

⁷² Wawancara KH. Qomari Abdurrahman tanggal 28 Maret 2014.

Mahfud. Kiai Mahfud sendiri, dengan usianya yang telah mencapai 49 tahun, tidak berminat mengejar posisi komandan batalyon, mengingat dengan kedudukannya sebagai "Rama Pusat", dengan massa AUI dan *thariqah syadzaliyah* yang diampunya, Kiai Mahfud sudah menempati posisi natural leader yang kharismanya melampaui batas-batas kabupaten, mengingat pesona AUI juga terasakan hingga Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap dan Purworejo, melebihi formal leader Bupati Kebumen yang waktu itu dijabat R.M. Istikno Sosrobudono.⁷³

Persoalan tak usai meski Batalyon Lemah Lanang sudah dibentuk. Sebagai batalyon yang beranggotakan para santri, yang dalam perang kemerdekaan mengumandangkan perang suci atau jihad kepada NICA yang dilabeli kafir, Batalyon Lemah Lanang mengalami *gegar budaya* ketika harus berbaur dengan unit-unit lain dalam APRIS yang notabene sebagian besar berisi perwira hasil didikan Militaire Academie Hindia Belanda. Lebih lagi perwira-perwira itu umumnya berasal dari kelas bangsawan Jawa yang merupakan masyarakat abangan. Batalyon Lemah Lanang dianggap kaku dalam berprinsip, radikal dan memiliki sudut pandang selalu hitam putih dan menganggap unit-unit di tubuh APRIS banyak mengadopsi kebiasaan Belanda.⁷⁴

Pertentangan ini makin melebar dan meluas hingga keluar dari skop Batalyon Lemah Lanang. Sampai akhirnya terjadi saling ejek yang berujung tawuran antara

⁷³ Wawancara KH. Musyafa Ali tanggal 31 Mei 2014.

⁷⁴ KH. Amallul Umam, cucu Kiai Mahfud. Wawancara: 5 Juni 2014

pemuda-pemuda AUI dengan anggota Batalyon Sudarsono. Tawuran tersebut menyebabkan satu pemuda AUI terbunuh. Akibatnya AUI bereaksi dan inilah yang ditanggapi Kol. M. Sarbini di Magelang sebagai indikasi AUI hendak memberontak, sehingga diperintahkanlah Batalyon Sudarsono dan Ahmad Yani menggempur Somalangu.⁷⁵

Tidaklah tepat jika AUI disebut memberontak karena hingga menjelang 1 Agustus 1950, Kiai Mahfud sama sekali tidak menyiapkan konsep-konsep untuk mendirikan negara tersendiri sebagaimana dilakukan SM Kartosuwiryo di Jawa Barat.⁷⁶ Meski pernah membicarakan wacana wilayah Kapoetihan⁷⁷, namun tak ada pembicaraan lebih lanjut, apalagi yang bersifat operasional semacam menyiapkan proklamasi, konstitusi dan angkatan perang tersendiri. Kiai Mahfud sendiri juga tidak menyiapkan suatu perangkat kaderisasi ataupun suatu *exile government* andaikata Somalangu sewaktu-waktu diserbu. Beberapa pertemuan memang berlangsung dengan pimpinan Batalyon 423 dan 426⁷⁸, namun itu lebih ditujukan pada bagaimana mengantisipasi persoalan di antara sesama laskar Hizbullah Sabilillah akibat kebijakan Rera yang diskriminatif. Tidak ada pertemuan dengan utusan DI/TII, baik

⁷⁵ Wawancara KH. Slamet tanggal 4 Juni 2014.

⁷⁶ Wawancara KH. Afifuddin Chanif Al Hasani tanggal 22 Juni 2014.

⁷⁷ Kapoetihan adalah semacam Kauman yang diperluas, tempat kediaman orang-orang saleh yang digambarkan menempati daratan sebelah timur Sungai Lukulo hingga perbatasan Purworejo. Wawancara KH. Slamet tanggal 4 Juni 2014.

⁷⁸ Keduanya sama-sama berasal dari laskar Hizbullah Sabilillah. Wawancara KH. Musyafa Ali tanggal 31 Mei 2014.

dari Kartosuwiryo sendiri maupun dari AmirFatah yang merupakan wakil Kartosuwiryo di Jawa Tengah.

Jika kemudian sisa-sisa Batalyon Lemah Lanang memilih untuk bergabung dengan sisa-sisa DI/TII Abdul Fattah, sisa-sisa Batalyon 426 dan 423 MMC (Merapi Merbabu Complex) di kaki Gunung Slamet, pilihan ini diambil pasca tertembak dan wafatnya Kiai Mahfud di Gunung Selok, Cilacap. Dengan kondisi organisasi AUI berantakan, pemimpin tertingginya wafat dan tak ada yang kader bisa menggantikan kharismanya, dengan Somalangu dan Kebumen timur sudah diobrak-abrik amunisi APRIS, tanpa ada tawaran rekonsiliasi dan amnesti agar bisa kembali ke masyarakat sebagai orang baik-baik, serta jika menyerah pun akan masuk Nusakambangan tanpa diadili seperti yang dialami ratusan massa AUI yang memilih menyerah, maka tak ada pilihan lain yang logis rasional kecuali menyelamatkan diri, bergabung dengan saudara senasib sepenanggungan dan terus bertempur, meski tak jelas lagi bertempur untuk apa.⁷⁹

Pasca pemberontakan AUI, aparat administrasi Kebumen maupun Jawa Tengah tidak belajar lebih jauh dari peristiwa AUI dan lebih memilih melakukan isolasi sosiologis-politis dengan labelisasi ekstrim kanan dan bagian DI/TII kepada sisa-sisa AUI, garis keturunan Kiai Mahfud, maupun penduduk Somalangu dan sekitarnya, tanpa tawaran rekonsiliasi. Dengan bupati-bupati yang mayoritas militer aktif, berasal dari luar Kebumen, tidak belajar lebih lanjut tentang sosiologi masyarakat setempat, berpandangan kaku dan main *hantam kromo*.

⁷⁹ Wawancara KH. Slamet tanggal 4 Juni 2014.

Konflik-konflik bersenjata di masa lampau dianggap selesai, apapun alasannya. Tetapi apakah keadilan sudah ditegakkan di dengan menyebut konflik-konflik yang terjadi sebagai pemberontakan. Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lalu kita sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi di dalam perspektif perikemanusiaan, bukan secara ideologis. Kalau kita menggunakan kaca mata ideologis saja, maka sudah tentu akan sangat mudah bagi kita untuk menganggap diri sendiri benar dan orang lain bersalah. Ini bertentangan dengan hakikat kehidupan bangsa kita yang demikian beragam. Kebhinekaan atau keragaman justru menunjukkan kekayaan kita yang sangat besar. Karena itu, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa atas kemelut yang masih menghingapi kehidupan bangsa ini.

Jelaslah dari uraian diatas, bahwa yang kita perlukan adalah sebuah rekonsiliasi nasional, setelah pengadilan memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak. Pengertian dari rekonsiliasi yang benar adalah pertama-tama mengharuskan adanya pemeriksaan tuntas oleh pihak pengadilan, kalau bukti-bukti yang jelas masih dapat dicari. Disinilah letak keadilan yang harus ditegakkan di Bumi Nusantara. Sebuah tekad untuk memeriksa kasus-kasus yang terjadi di depan mata kita dalam limabelas tahun terakhir ini, justru meminta kita agar melupakan apa yang terjadi 50-60 tahun yang lalu. Baru kemudian diumumkan pengampunan setelah vonis pengadilan dikeluarkan. Terdengar mudah dilakukan, namun dalam kenyataannya sulit dilakukan.